

BAB V

Kesimpulan

Mengacu kepada perumusan masalah yaitu “**Apakah manfaat nasionalisasi perusahaan multinasional PT. Inalum dari investor Jepang bagi Indonesia?**” maka dapat disimpulkan bahwa nasionalisasi PT. Inalum dari pihak Jepang memiliki dampak yang cukup menguntungkan Pemerintah Indonesia. Meski masih ada beberapa faktor yang masih belum dapat dikaji dikarenakan PT. Inalum masih berada dalam masa transisi, perkembangan Inalum sebagai BUMN dapat dikatakan memberikan hasil yang memuaskan.

Mengingat PT. Inalum dinasionalisasi pada tahun 2013 dan masih berada di dalam masa transisi selama 5 tahun, semenjak PT. Inalum diambil alih oleh Pemerintah Indonesia telah terlihat memiliki potensi yang menjanjikan. Hal ini dapat dilihat dari peran PT. Inalum yang kemudian menjadi perusahaan *holding* dan bercabang dari perusahaan tambang aluminium menjadi perusahaan yang juga menjalankan pembangkit listrik tenaga air yang bersumber dari Sungai Asahan di wilayah Sumatera Utara. Pembangkit listrik yang dilaksanakan oleh PT. Inalum pun berkembang dari mulanya listrik yang dihasilkan untuk keberlangsungan smelter perusahaan menjadi listrik yang didistribusikan untuk kepentingan masyarakat umum khususnya masyarakat wilayah Sumatera Utara.

Alasan lain yang menggambarkan keberhasilan nasionalisasi PT. Inalum adalah performa perusahaan yang meningkat setahun pertama setelah di nasionalisasi dan mandiri milik Pemerintah Indonesia. Setelah dinasionalisasi

oleh Pemerintah Indonesia, PT. Inalum terbukti menjadi kontributor dalam peningkatan PAD Provinsi Sumatera Utara hingga sebesar 10 miliar rupiah. Selain itu, Inalum juga menjadi salah satu BUMN penghasil aluminium terbesar di Indonesia. Hal ini menyebabkan persediaan aluminium Indonesia yang meningkat karena seluruh hasil produksi aluminium yang dihasilkan oleh PT. Inalum yang awalnya dikirim ke Jepang masuk ke persediaan aluminium Indonesia. Dengan naiknya persediaan aluminium dalam negeri, untuk memenuhi kebutuhan aluminium dalam negeri, Pemerintah Indonesia dapat mengalokasikan persediaan yang ada dan tidak lagi mengekspor aluminium sebanyak tahun-tahun sebelumnya sebelum PT. Inalum di nasionalisasi. Melihat kondisi ini, dapat disimpulkan bahwa setelah dinasionalisasi, perkembangan Inalum dilihat menjanjikan bagi perekonomian Indonesia baik daerah maupun perekonomian Indonesia secara keseluruhan.

Keberhasilan nasionalisasi PT. Inalum juga dapat dilihat dari faktor perubahan status Inalum yang langsung dijadikan BUMN mandiri dan bukan anak BUMN pertambangan lainnya. Sebagai perusahaan *holding*, Inalum memegang peran penting dalam berkecimpung di industri pertambangan Indonesia. Dikarenakan signifikansi perannya, Inalum yang bergerak di bidang pertambangan ditunjuk oleh Pemerintah Indonesia untuk memimpin kerja sama untuk mengambil alih 51% saham Freeport. Kesuksesan nasionalisasi Inalum dianggap dapat dijadikan contoh untuk pengambilalihan saham Freeport. PT. Inalum yang bekerja sama dengan BUMD bentukan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika diberikan komitmen pendanaan oleh

Pemerintah Indonesia untuk mengambil alih saham yang akhirnya akan dikonversi menjadi saham Freeport milik Pemerintah Indonesia. Dapat dikatakan bahwa Inalum memegang peran penting yang dipercayakan oleh Pemerintah Indonesia untuk memimpin kerja sama dalam hal mekanisme pengambilalihan Freeport yang akan mempengaruhi industri pertambangan di Indonesia.

Setelah meninjau dan mengkaji dari berbagai data-data yang sudah disajikan dalam tulisan ilmiah diatas maka dapat disimpulkan keputusan Pemerintah Indonesia untuk melakukan nasionalisasi terhadap PT. Inalum yang sebelumnya dimiliki oleh konsorsium Jepang merupakan keputusan yang dapat dikatakan berhasil dan sesuai dengan tujuan negara untuk memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia dari pendapatan negara yang didapatkan dari lini bisnis PT. Inalum sebagai perusahaan tambang aluminium dan juga dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan aluminium dalam negeri.

Keberhasilan nasionalisasi ini juga dapat ditinjau dari manfaat yang diberikan oleh PT. Inalum berupa pembangkit listrik tenaga air yang sekarang dapat dimanfaatkan untuk penyediaan listrik bagi PLN yang kemudian disalurkan untuk masyarakat terutama di sekitar sungai Asahan dan juga secara tidak langsung menunjang peningkatan taraf hidup masyarakat disekitar sungai Asahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adam Smith, *Wealth of Nation*, (New York: Cosimo Inc., 1901), hal 558-563.
- Arthur Sullivan, *Economics: Principles in Action*, (New Jersey: Pearson/Prentice Hall, 2007), hal. 471.
- Ashoka Mody, *Foreign Direct Investment and the World Economy*, (New York: Routledge, 2007), hal. 53-55.
- Bondan Kanumoyoso, "Nasionalisasi Perusahaan Belanda di Indonesia. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan," 2001.
- Dian Puji N. Simatupang, *Paradoks Rasionalitas Perluasan Ruang Lingkup Keuangan Negara dan Implikasinya terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah* (Jakarta: Badan Penerbit FHUI, 2011), hal 232.
- Dieter Bos, *Public Enterprise Economics*, (New York: ELSEVIER SCIENCE PUBLISHING COMPANY, INC., 1989), hal. 25.
- Donald J. Lecraw, *Indonesia: The Critical Role of Government dalam Foreign Direct Investment and Governments: Catalysts for Economic Restructuring*, (London: Routledge, 2005), hal. 246-248.
- Guide to Japan's Aid*, " 1990, Tokyo: Association for Promotion of International Cooperation.
- John H. Dunning dan Rajneesh Narula, *Foreign Direct Investment and Governments: Catalysts for Economic Restructuring*, (London: Routledge, 2005), hal. 1-7.
- John W. Cresswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches Third Edition*, (California: SAGE Publications, 2009), hal. 4.
- J.W. Horrocks, *A Short Story of Mercantilism*, (New York: Bretano's, 1925), hal. 1.
- Lars Magnusson, *The Political Economy of Mercantilism*, (New York: Routledge, 2015), hal 3.
- Masashi Nishihara, "The Japanese and Sukarno's Indonesia: Tokyo-Jakarta Relations," 1951-1966, Honolulu: The University Press of Hawaii, 1976.

- Pante Jr, Filologo, "Japan's Growing External Assets: A Medium for Regional Growth?", International Symposium on Asian Pacific Cooperation, Hongkong: Lingnan College, 1988.
- Patrick Juillard, *Calvo Doctrine and Calvo Clause*, Max Planck Encyclopedia of Public International Law, 2007.
- Robert E. Lipsey, Home and Host Country Effects of FDI, Cambridge, Oktober, 2002.
- Rudolf Hilferding, Finance Capital, hlm. 234.
- Scott Burchill, The National Interest in International Relations Theory, (London: Palgrave Macmillan UK), hal . 8-10.
- Theodore H. Cohn, Global Political Economy: Theory and Practice, (New York: Addison Wesley Longman, Inc., 2002), hal. 319.
- Tuller L.W., *Going Global: New Opportunities For Growing Companies to Compete in the World Markets*, Homewood : Business one Irwin, 1991.
- Umar Suryadi Bakry, Metode Penelitian Hubungan Internasional, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hal. 18.

Jurnal

- Dwi Kherisna Payadnya, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam," Kertha Negara Vol. 2, no. 2 (2014): 1-5.
- E. Borensztein, "How does foreign direct investment affect economic growth?," Journal of International Economics Vol. 45 (2015): hal. 117.
- Gabriel Sabbagh, Contributions to Political Economy, vol 34, No. 1 (2015): 105–124.
- James Petras, "Dependency and World System Theory: A Critique and New Directions," Latin American Perspectives Vol. 8, No. 3, (1981): hal 149-150.
- Joaquin Melgarejo Morena, "From Privatisation to Nationalisation: Repsol-YPF," Utilities Policy, Vol. 26, (2013): hal. 45-46.

- Michael Lind, "Hamilton's Legacy," *The Wilson Quarterly* (1976) vol. 18, no. 3 (Summer 1994): hal 40.
- Mohammad Amin Almfraji, Mahmoud Khalid Almsafir, "Economic Growth and Foreign Direct Investment Inflows: The Case of Qatar," *Social and Behavioral Sciences*, Vol. 109 (2014): hal. 1040-1041.
- Muhammad Mujtaba Habibi, "Analisis Pelaksanaan Desentralisasi Dalam Otonomi Daerah Kota/Kabupaten," *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* Vol. 28, no. 2 (2015):118-119.
- Paul Cantor, "Nationalization, Socialism, and the Optimum Size of the State Sector," *Socio-Econ Plan* Vol. 24, No. 2 (1990): 155.
- Murtir Jeddawi, *Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah* (Jakarta: Total Media, 2008), hal 23 .
- Sasidaran Gopalan, Rabin Hattari, dan Ramkishen S. Rajan, "Understanding foreign direct investment in Indonesia," *Journal of International Trade Law and Policy*, Vol. 15 No. 1 (2016): hal. 28-50.
- Syahyu Yulianto, "Pertumbuhan Investasi Asing di Kepulauan Batam: Antara Dualisme Kepemimpinan dan Ketidakpastian," *Hukum, Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 22, No. 5, Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis, Jakarta, 2003.
- Tony Smith, "The Underdevelopment of Development Literature: The Case of Dependency Theory," *Journal Of World Politics*, (Januari, 1979): hal. 247-288.
- Utji Sri Wulan Wuryandari, "Nasionalisasi PT. Inalum Menurut Undang-Undang Penanaman Modal (Undang-Undang No. 25 Tahun 2007) : Pro Kontra Indonesia Dan Jepang," *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis* Vol. 1, no. 1, 2 Juni, 2016.

Website

- Bambang Priyo Jatmiko, "Kuasai Saham Freeport, Negosiasi Inalum dan Rio Tinto Masih Alot," *Kompas*, 20 April, 2018, <https://ekonomi.kompas.com/read/2018/04/30/154824526/kuasai-saham-freeport-negosiasi-inalum-dan-rio-tinto-masih-alot>, diakses 21 Juni, 2018.
- Dee Waluyo, "Resmi Sebagai Holding, PT. Inalum Punya Tugas Ambil Alih Divestasi Saham Freeport," *JPP*, 28 November, 2017,

<https://jpp.go.id/keuangan/investasi/313412-resmi-sebagai-holding-pt-inalum-punya-tugas-ambil-alih-divestasi-saham-freeport>.

Estu Suryowati, "Pemda Sumut "Ngotot" Kuasai Inalum," Kompas, 22 Oktober, 2013,
<https://edukasi.kompas.com/read/2013/10/22/2121268/Pemda.Sumut.Ngotot.Kuasai.Inalum>, (diakses 31 Mei, 2018).

Ferdian Nevri Putra, "Nasionalisasi PT. Inalum Oleh Pemerintah Indonesia," 14 Desember, 2013, <http://bem.feb.ugm.ac.id/nasionalisasi-pt-inalum-oleh-pemerintah-Indonesia/>.

Hendra Kusuma, "Divestasi 51% Saham Freeport Rampung Juni 2018," Detik Finance, 12 Januari, 2018, <https://finance.detik.com/energi/d-3812339/divestasi-51-saham-freeport-rampung-juni-2018>, diakses 21 Juni, 2018.

Hilman Qomarsono, "Prospek PT. Inalum Pasca Pengambilalihan oleh Pemerintah," Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2016.

Jual Listrik ke PLN, Inalum Bisa Dapat Rp 2 Triliun," Detik Finance, 10 November, 2014, <https://finance.detik.com/energi/d-2744106/jual-listrik-ke-pln-inalum-bisa-dapat-rp-2-triliun>, diakses 21 Juni, 2018.

Lily Rusna Fajriah, "Dahlan Restui Pemda Sumut Caplok 25% Saham Inalum," Sindonews, 26 September, 2014,
<https://ekbis.sindonews.com/read/905504/34/dahlan-restui-pemda-sumut-caplok-25-saham-inalum-1411718436>, (diakses 31 Mei, 2018).

Miko Kamal, "Nasionalisasi Inalum dan Hibah Saham," Hukum Online, 10 Desember, 2013,
<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt52a733e632b8e/nasionalisasi-inalum-dan-hibah-saham-broleh--miko-kamal--phd->.

PLN, "Profil Perusahaan," <http://www.pln.co.id/tentang-kami/profil-perusahaan>.

PT. Inalum, "About us," PT. Inalum, <http://www.inalum.id/about-us.html>.

Riendy Astria, "Home," Industri - Berita Terbaru Tentang Manufaktur, Energi, Migas, Perdagangan, Agribisnis, Infrastruktur, Transportasi, Logistik Dan Telekomunikasi, 24 Juni, 2013, , diakses Mei 2018,
<http://industri.bisnis.com/read/20130624/257/146873/k>.

Yudho Winarto, "Darmin Pelajari Kasus Inalum vs Pemprov Sumut," Kompas, 31 Desember, 2016, <https://nasional.kontan.co.id/news/menko-darmin-pelajari-kasus-inalum-vs-pemprov-sumut>, (diakses 31 Mei, 2018).

Data Resmi

Bank Indonesia, "Sejarah Bank Indonesia: Perbankan", diakses tanggal 27 Maret, 2018,
<http://www.bi.go.id/en/tentangbi/museum/sejarahbi/bi/Documents/06f05e1acbf14f34925666e72708e56eMicrosoftWordHistoryofInstitutionPeriod19531959.pdf>.

Bank Indonesia, History of Bank Indonesia: Institution, diakses tanggal 24 Maret, 2018,
<http://www.bi.go.id/en/tentangbi/museum/sejarahbi/bi/Documents/06f05e1acbf14f34925666e72708e56eMicrosoftWordHistoryofInstitutionPeriod19531959.pdf>.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, "Freeport Harus Patuhi Undang-Undang," Jakarta: Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI, 2017.

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Laporan Kunjungan Kerja Komisi VII DPR RI ke Provinsi Sumatera Utara, Jakarta: Komisi VII DPR RI, 2016.

Inalum, Laporan Tahunan tahun 2014.

Inalum, Laporan Tahunan tahun 2015.

Inalum, Laporan Tahunan tahun 2016.

Kementerian Perdagangan, "Perkembangan Perdagangan Indonesia-Jepang," Jakarta, 2014, <http://www.kemendag.go.id/files/pdf/2014/05/30/report-1401438490.pdf>.

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Inalum Akan Jadi BUMN Baru, Jakarta: Media Indonesia, 2013.

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Inalum Dongkrak PAD Batubara, Jakarta: Jurnal Nasional, 2014.

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Inalum Lebih Baik Jadi BUMN Baru, Jakarta: Investor Daily, 2012.

Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, loc. cit.

- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Menperin Dorong Inalum Ekspansi ke Kaltara, Jakarta: Jurnal Nasional, 2014.
- Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Pemda Sumut Terancam Batal Dapat Saham Inalum, Jakarta: Kontan Harian, 2014.
- Prof. Yugeta Hiroshi, Touin University, Yokohama, Jepang.
- Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI, “Kajian Hukum Atas Divestasi Saham Bidang Pertambangan Di Indonesia,” Tries Palupi Kurnianingrum, 2012.
- UNCTAD, World Investment Report, 2007.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pasal 33, ayat 3.
- Undang-undang No. 24 tahun 1951 mengenai Nasionalisasi De Javasche Bank N.V.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1959 tentang Penentuan Perusahaan Listrik dan/atau Gas Milik Belanda yang Dikenakan Nasionalisasi. (t.thn.).
- World Investment Report, 2004, hal. 3.